

Politik dalam Al Qur'an

Ikrar Hakiki¹, Edi Hermanto², Ali Akbar³, M. Ziyen Adabi⁴,
Ferdi Hasayangan Dalimunthe⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3,4,5}

*Email;

ikrarhakiki06@gmail.com; edihermanto@uin-suska.ac.id; aliakbarusmanhpa@gmail.com;
ziyanadabiyen@gmail.com; dalimuntheferdi1@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-06-2025
Disetujui 05-06-2025
Diterbitkan 07-06-2025

ABSTRACT

The Qur'an as the holy book of Muslims does not only discuss issues of faith and worship, but also covers various aspects of social life, including political and governmental issues. In the view of Islam, politics is not just a struggle for power or an elite game, but a form of great mandate aimed at realizing justice, welfare, and the benefit of the people. Qur'anic politics has distinctive characteristics, because it is built on the values of tawhid, justice ('adl), deliberation (shura), responsibility (amanah), and leadership that is oriented towards service and protection of the people. This article aims to examine the basic concepts of politics in the Qur'an and how these values can be implemented in the life of the nation and state. This research uses a literature study approach by examining various Qur'anic verses that speak about politics directly or indirectly, and referring to the interpretations of classical and contemporary scholars. The analysis is done thematically on central issues such as leadership, legal justice, collective decision-making, and integrity of power. The results of the study show that the Qur'an has integral and sustainable political guidance. Qur'anic political values were not only relevant during the time of Prophet Muhammad SAW and Khulafaur Rasyidin, but also very applicable in answering various challenges of modern times such as moral crises in politics, corrupt practices, and government systems that are not in favor of the people.

Keywords: Qur'anic politics, justice, leadership, trust ethics of power.

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya membahas persoalan akidah dan ibadah, namun juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk persoalan politik dan pemerintahan. Dalam pandangan Islam, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan atau permainan elit, melainkan suatu bentuk amanah besar yang bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Politik Qur'ani memiliki karakteristik yang khas, karena dibangun di atas nilai-nilai tauhid, keadilan ('adl), musyawarah (syura), tanggung jawab (amanah), dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep dasar politik dalam Al-Qur'an dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah berbagai ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang politik secara langsung maupun tidak langsung, serta merujuk pada tafsir ulama klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan secara tematik terhadap isu-isu sentral seperti kepemimpinan, keadilan hukum, pengambilan keputusan kolektif, serta

integritas kekuasaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki panduan politik yang integral dan berkelanjutan. Nilai-nilai politik Qur'ani tidak hanya relevan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, tetapi juga sangat aplikatif dalam menjawab berbagai tantangan zaman modern seperti krisis moral dalam politik, praktik korupsi, dan sistem pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat.

Kata Kunci: Politik Qur'ani, keadilan, kepemimpinan Islam, amanah, etika kekuasaan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ikrar Hakiki, Edi Hermanto, Ali Akbar, M. Ziyen Adabi, & Ferdi Hasayangan Dalimunthe. (2025). Politik dalam Al Qur'an. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 770-775. <https://doi.org/10.63822/9qcjke66>

PENDAHULUAN

Politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sebab di dalamnya terdapat proses pengelolaan kekuasaan, pembuatan kebijakan, dan pengaturan hubungan antarindividu maupun kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Islam, politik memiliki dimensi spiritual yang tinggi karena tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada keadilan, tanggung jawab moral, dan pengabdian kepada Tuhan serta umat manusia.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya memberikan pedoman dalam hal ibadah dan akhlak, tetapi juga membimbing umat dalam urusan sosial-politik. Konsep politik dalam Al-Qur'an tidak dirumuskan secara sistematis seperti teori politik modern, namun esensinya termaktub dalam ayat-ayat yang membahas tentang kepemimpinan, keadilan, amanah, musyawarah, serta pengambilan keputusan yang bijaksana. Sejak masa Rasulullah SAW, politik telah menjadi bagian dari risalah kenabian yang integral dengan syariat Islam, sebagaimana beliau bertindak sebagai pemimpin spiritual sekaligus kepala negara di Madinah.

Dalam Al-Qur'an, kekuasaan atau mulk dipandang sebagai amanah yang berasal dari Allah SWT, bukan sebagai hak absolut manusia. Oleh karena itu, penyelenggara kekuasaan harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ('adl), musyawarah (syura), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Politik yang berorientasi pada nilai-nilai Ilahiyah inilah yang disebut sebagai politik Qur'ani.

Namun, dalam praktiknya dewasa ini, realitas politik seringkali jauh dari nilai-nilai ideal tersebut. Krisis integritas, maraknya korupsi, serta penyalahgunaan wewenang menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan beretika. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam, khususnya generasi muda dan intelektual Muslim, untuk kembali menggali nilai-nilai politik dalam Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi normatif dan etis dalam membangun sistem politik yang berkeadaban.

Artikel ini berupaya menjawab bagaimana konsep dasar politik dalam Al-Qur'an dibangun dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan interpretasi para mufassir, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang politik dari perspektif wahyu Ilahi.

PEMBAHASAN.

Kepemimpinan dalam Politik Qur'ani

Dalam Al-Qur'an, kepemimpinan dipandang bukan sebagai hak mutlak seorang individu, melainkan sebagai sebuah amanah (amanah) yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral. Kepemimpinan adalah pengabdian kepada umat dan bentuk pengelolaan kekuasaan yang harus berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 58: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."* (QS. An-Nisa': 58)

Ayat ini menggaris bawahi bahwa pemimpin harus menegakkan keadilan dan hanya memegang kekuasaan sebagai titipan dari Allah. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh konkret dari kepemimpinan Qur'ani; beliau memimpin tidak hanya sebagai kepala negara tapi juga sebagai pembimbing spiritual yang mengutamakan maslahat umat, kesederhanaan, dan kejujuran. Kepemimpinan beliau selalu

melibatkan konsultasi dengan para sahabat dalam pengambilan keputusan penting, mencontohkan prinsip musyawarah (syura) yang mendasar dalam politik Islam.

Keadilan (Adl) sebagai Pilar Utama Politik Qur'ani

Keadilan menjadi fondasi utama dalam sistem politik Islam yang dibangun atas wahyu. Politik Qur'ani menuntut penegakan hukum secara adil tanpa diskriminasi dan kepentingan pribadi. Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah memerintahkan agar umat Islam berlaku adil meskipun terhadap pihak yang tidak disukai: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah, walaupun itu terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, atau kerabat dekat..."* (QS. Al-Ma'idah: 8)

Keadilan ini bukan hanya soal hukum formal, tetapi juga keadilan sosial dan politik yang merata sehingga semua lapisan masyarakat merasa terlindungi hak-haknya. Dalam konteks modern, ajaran ini menjadi kritik tajam terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan diskriminasi yang sering terjadi dalam pemerintahan. Keadilan Qur'ani juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin serta sistem politik yang menjamin hak rakyat secara menyeluruh.

Musyawarah (Syura) sebagai Mekanisme Pengambilan Keputusan

Syura adalah metode konsultasi dan musyawarah kolektif yang menjadi salah satu prinsip sentral dalam politik Qur'ani. Dalam Surah Ash-Shura ayat 38 disebutkan: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..."* (QS. Ash-Shura: 38)

Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan politik tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh satu individu atau kelompok elit, melainkan harus melibatkan proses dialog, konsultasi, dan mufakat dengan berbagai pihak yang terkait. Prinsip syura ini menjadi dasar bagi praktik demokrasi dalam Islam yang mengedepankan partisipasi rakyat dan transparansi dalam pemerintahan. Musyawarah juga mengajarkan sikap saling menghargai, toleransi, dan keterbukaan terhadap berbagai pendapat, sehingga menghasilkan keputusan yang berimbang dan berkeadilan.

Amanah dan Tanggung Jawab Kekuasaan

Dalam perspektif Al-Qur'an, kekuasaan adalah titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan (mas'uliyah). Surah Al-Ahzab ayat 72 menyebutkan: *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengingkarnya, dan dipikunya amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh..."* (QS. Al-Ahzab: 72)

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab kekuasaan sangat berat dan tidak semua mampu memikulnya dengan benar. Amanah kekuasaan menuntut integritas, kesadaran moral, dan keikhlasan pemimpin untuk tidak menyalahgunakan posisi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Kekuasaan harus diarahkan untuk pelayanan publik, perlindungan hak-hak rakyat, dan penegakan hukum yang adil. Pelanggaran amanah ini, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, menjadi sebab runtuhnya kepercayaan masyarakat dan ketidakstabilan politik.

Integritas Kekuasaan dan Etika Politik

Politik Qur'ani tidak hanya menitikberatkan pada aspek struktural pemerintahan, tetapi juga etika kekuasaan yang berakar pada nilai-nilai tauhid. Pemimpin dan aparat pemerintahan harus memiliki

kesadaran spiritual dan moral yang tinggi agar kekuasaan tidak menjadi alat penindasan. Dalam berbagai ayat, Al-Qur'an mengingatkan agar kekuasaan digunakan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Misalnya, Surah Al-Baqarah ayat 30 menegaskan peran manusia sebagai khalifah (wakil Allah di bumi) yang harus mengelola kekuasaan dengan penuh tanggung jawab.

Relevansi Politik Qur'ani di Era Modern

Meskipun Al-Qur'an diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, nilai-nilai politik yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan politik masa kini. Krisis moral dalam politik, seperti korupsi, nepotisme, otoritarianisme, dan ketidakadilan sosial, dapat diatasi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip politik Qur'ani yang menekankan keadilan, musyawarah, dan amanah. Misalnya, konsep syura dapat menjadi fondasi bagi pengembangan demokrasi yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan sekadar kepentingan kekuasaan.

Selain itu, politik Qur'ani memberikan landasan spiritual yang memperkuat ketahanan moral para pemimpin dan masyarakat agar tidak terjerumus pada praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memahami politik sebagai amanah dari Allah, para pemimpin diharapkan mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga tercipta tatanan politik yang bersih, adil, dan beradab.

KESIMPULAN

Politik dalam Al-Qur'an merupakan sebuah konsep yang menyeluruh dan berlandaskan nilai-nilai ilahiyah yang tinggi, seperti tauhid, keadilan (*`adl*), musyawarah (*syura*), amanah, dan tanggung jawab moral. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar penguasaan kekuasaan, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas, keadilan, dan pelayanan kepada rakyat. Prinsip-prinsip politik Qur'ani ini menuntut pengambilan keputusan yang kolektif dan bijaksana serta menegakkan hukum dan pemerintahan yang berkeadilan tanpa diskriminasi.

Nilai-nilai tersebut sangat relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan politik dan pemerintahan masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis moral dalam politik. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi politik Qur'ani diharapkan dapat menjadi landasan etis dan normatif bagi umat Islam dalam membangun sistem politik yang bersih, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara luas.

Dengan demikian, politik dalam Al-Qur'an bukan hanya persoalan kekuasaan duniawi, tetapi juga merupakan upaya spiritual dan sosial yang integral untuk menegakkan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

SARAN

Sebagai penulis, kami menyarankan agar setiap elemen bangsa khususnya umat Islam kembali menelaah dan menghidupkan nilai-nilai politik yang diajarkan Al-Qur'an. Prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial bukanlah idealisme kosong, melainkan fondasi kokoh bagi terbentuknya tatanan politik yang bermartabat dan berkeadilan. Dalam realitas politik yang sering dipenuhi oleh pragmatisme, fanatisme kelompok, dan kepentingan sesaat, kita memerlukan visi yang lebih luhur. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kekuasaan adalah alat untuk menebar maslahat, bukan sarana

menumpuk kekayaan atau memperkuat kekuasaan pribadi. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya harus cerdas secara politik, tetapi juga beretika. Kita tidak cukup hanya memilih pemimpin yang "kuat", tetapi harus memastikan bahwa mereka juga jujur, adil, dan bertanggung jawab. Politik Qur'ani bukanlah sekadar sistem pemerintahan, tetapi cara hidup yang menempatkan nilai spiritual dan moral di atas kepentingan duniawi.

Semoga kita semua dapat berkontribusi sekecil apapun dalam menghadirkan politik yang lebih bersih, beradab, dan sejalan dengan petunjuk Ilahi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Firdausiyah, Jannatul, dan Ainur Rofiq Sofa. 2024. "Relevansi Al-Qur'an dan Hadits dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1
- Harun Nasution. 1990. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Maloko, M. Tahir. 2022. "Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1
- Maulana, Muhammad Asrul, dan Fahmiyah Tsaqofah Islamiy. 2023. "Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 terhadap Pembuatan Produk Politik." *Politea: Jurnal Politik Islam* 6, no. 2.
- Mursyid, Achmad Yafik, Muhammad Dzilfikri AlBaihaqi, dan Alvy Ra'isatul Murtafi'ah. 2024. "Politics and Pluralism: Analyzing State Official Tafsir and Interfaith Discourse in Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 1
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fiqh Daulah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, Muhammad, Said Agil Husin Al-Munawar, dan Arrazy Hasyim. 2024. "Dimensi Kebebasan dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maqasidi terhadap Nilai-Nilai Politik." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 12, no. 2
- Salsabila, Az Zahra, Siti Chodijah, dan Eni Zulaiha. 2023. "Hak Politik Wanita dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an." *Gunung Djati Conference Series* 1, no. 1